

**PENINGKATAN KAPASITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN**

***)Titi Darmi, **)Iqbal Miftakhul Mujtahid**

***)Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

****)Proram Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Terbuka**

***)titidarmi@umb.ac.id**

Abstract

Poverty is not a descent or a destiny, poverty is an impact rather than a regional manager not doing what it should. This study aims to analyze the policy of village funds as an effort to step up poverty, focus the study on Sido Luhur village in Seluma District. The research method is qualitative, primary and secondary data source. The research informants are the Village Head, Village Secretary, Village Office (Kadus), members of the Village Consultative Body (BPD) and Community Leaders. The result of the research shows that the policy of village fund has contributed significantly to the progress of Sidohulur village. However, fund policy has not been instrumental in helping to reduce poverty level either in Sido Luhur village or in Seluma Regency by macro.

Keywords: Policy, Village Fund, Poverty Alleviation, New Autonomous Region

Pendahuluan

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah dicanangkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 6 Februari 2006, program pengentasan kemiskinan juga menjadi program prioritas Presiden Jokowi dengan Nawa Cita yakni membangun Indonesia dimulai dari pinggiran. Maksud dan tujuannya tak lain adalah untuk mengatasi kesenjangan antara desa dan kota baik dari sisi pemerataan ekonomi, pengembangan kapasitas manusia maupun untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa-desa.

Komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ditunjukkan melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa (DD). Salah satu point yang penting dalam penerapan UU Desa adalah penganggaran kebijakan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBN setiap tahun. Kebijakan DD ini merupakan kebijakan publik yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan (Darmi, T, 2016a).

Kebijakan dana desa berdampak pada strategi pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang awalnya hanya berfokus di ibu kota, mulai fokus digeser ke desa agar lebih merata ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari kenyataan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) merupakan salah satu strategi untuk mengakhiri kesenjangan antara desa dan kota, dan berperan mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Kebijakan publik berupa UU Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh Kabupaten Seluma dan desa Sido Luhur.

Pengalokasian dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan selamaini, terutama mengatasi kemiskinan di desa – desa tertinggal. Besaran penerimaan transfer DD di Kabupaten Seluma sangat berarti dalam pembangunan pedesaan. Anggaran dana desa pada tahun 2016 sebesar 109.690 milyar, pada tahun 2017 transfer DD meningkat menjadi 139.486 milyar, diperuntukan 180 desa. Mendapat peringkat nomor 3 terbesar di antara kabupaten/kota lain di provinsi Bengkulu (KemenKeu 2016).

Kabupaten Seluma merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran daerah induk yakni Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2003. Kabupaten Seluma menjadi sangat menarik untuk diamati mengingat kondisinya, walaupun sudah menjadi daerah otonom selama 14 tahun, namun belum ada peningkatan yang berarti dalam

pencapaian tujuan otonomi sebenarnya (Darmi 2017).

Data empiris menunjukkan di usia 14 Tahun, Kabupaten Seluma belum bisa menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya (Darmi, et.at, 2017). Data lain menunjukkan tingkat kemiskinan pada Kabupaten Seluma dari tahun 2013 – 2017 masih di atas 21 % (BPS Provinsi Bengkulu, 2017), angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional.

Secara Nasional, angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)RI,pada bulan Maret 2017 merilis tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun, periode Maret 2016 jumlah penduduk miskin 17,67 juta jiwa atau 14,11%. Setahun kemudian pada Maret 2017 BPS mencatat penduduk miskin berjumlah 17,10 juta jiwa atau 13,93%.Periode Maret 2016 sampai dengan Maret 2017, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun sebanyak 181,29 ribu jiwa sedangkan jumlah masyarakat miskin di perkotaan bertambah 188,19 ribu jiwa (BPS RI, 2017). Penurunan tingkat kemiskinan di desa tersebut diasumsikan adanya peran kebijakan penganggaran Dana Desa.

Kabupaten Seluma salah satu daerah termiskin, terisolir dan terbelakang

dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 001/Kep/M-PDT/I/2005, masuk kategori terisolir dan terbelakang,lebih kurang memiliki wilayah desa tertinggal 50% dari jumlah 182 desa.Untuk meminimalkan dampak ketertinggalan desa-desa di wilayah Kabupaten Seluma, kebijakan transfer dana desa adalah salah satu alternatif yang bijaksana dan perlu didukung semua stakeholder atau aktor pelaku kebijakan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Dana Desa sangat tergantung bagaimana keinginan para pelaku kebijakan Dana Desa dapat meningkatkan kapasitasnya.

Peningkatan kapasitas diartikan kemampuan individu dan kelompok serta organisasi dapat menjalankan prosesdan menghasilkan outcome yang diinginkan. Kebijakan dana desa merupakan potensi yang luar biasa, sayang kalau dilewatkan tanpa ada manfaat yang maksimal. Kebijakan dana desa kalau dikelola dengan tepat sasaran diasumsikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu desa di Kabupaten Seluma yang mendapat bantuan DD adalah Desa Sido Luhur. Kondisi terkini di Desa Sido Luhur,dari 182 desa di Kabupaten Seluma desa Sido Luhur tidak termasuk

desa terisolir maupun terbelakang. Bila melihat kondisi 3 - 4 tahun lalu, kondisi desa Sido Luhur masih sangat kurang, misalnya, belum memiliki balai desa, belum ada penataan aset desa, belum dilakukan pencatatan surat masuk/keluar dan pengelolaan administrasi desa maupun pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan baik dan benar. Kondisi sekarang (tahun 2017), sudah sangat menggembirakan, sudah memiliki balai desa yang presentatif, unsur penunjang pelaksanaan desa sudah sangat mumpuni dan memiliki aparatur desa dan kepala desa yang baik dalam rangka pembangunan desa Sido Luhur.

Desa Sido Luhur merupakan salah satu desa yang masuk dalam bagian program pengentasan kemiskinan. Penelitian awal menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Sido Luhur selama tiga tahun terakhir, tidak mengalami perubahan. Kemiskinan yang dimaksud dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sido Luhur. Tingkat kemiskinan dilihat juga dari kondisi rumah tangga seberapa besar pengeluarannya dan penghasilannya. Semakin tinggi pengeluaran dan penghasilan rumah tangga maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi. Warga masyarakat yang memiliki pendapatan rendah memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Uraian di atas menegaskan ada hal yang menarik untuk dikaji, bagaimana kapasitas kebijakan dana desa dapat menjadi akselerator yang tepat untuk mengatasi tingkat kemiskinan di desa Sido Luhur Kabupaten Seluma sebagai penerima mandat DOB, fokus pengamatan hanya pada apa tingkat kemiskinan menjadi berkurang dengan adanya kebijakan DD di desa Sido Luhur. Hal ini, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sido Luhur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sumber data dalam penelitian ini yakni: 1) data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan kondisi keuangan desa, Musrebangdes, RPJMDes, APBDDes dokumentasi hasil rapat yang dilakukan oleh desa beserta stakeholder, laporan penggunaan uang desa dan regulasi-regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan; 2) data primer yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan Fokus Group Discussion (FGD) kepada informan yang peneliti anggap memiliki kapasitas dalam melaksanakan kebijakan dana desa, yakni Kepala Desa, Sekdes, Kaur-kaur dan BPD serta masyarakat desa yang merasakan dampak dari kebijakan dana desa.

Wawancara dilakukan secara terus menerus dan berakhir setelah mendapatkan

informasi yang berulang-ulang dan bersifat jenuh. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode purposive sampling, dengan pendekatan berdasarkan kriteria (Patton 2009).

Informan kunci dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, penulis tetapkan 5 orang yakni 1) Kepala Desa Sido Luhur; 2) Sekretaris Desa; 3) 1 orang Kadus; 4) 2 orang anggota BPD (sekaligus dianggap tokoh masyarakat); 5) 6 orang warga masyarakat. Untuk informan masyarakat umum, pemilihan informan dilakukan dengan cara accidental sampling, yakni, teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan, siapa saja warga/masyarakat desa Sido Luhur yang secara kebetulan bertemu pada saat penelitian dilakukan.

Untuk mengetahui informasi, peneliti menggunakan beberapa cara, yakni; 1) observasi; 2) wawancara; 3) studi dokumentasi; 4) Fokus Group Discussion (FGD). Teknik memperoleh data primer, pertama penulis melakukan kunjungan kepada Kepala Desa, setelah itu berlanjut wawancara kepada Sekretaris Desa, Kadus dan anggota BPD. Untuk mendalami hasil dari wawancara tersebut, dilakukan FGD dengan informan kunci. Untuk memperkuat keyakinan data yang diperoleh, peneliti melakukan validasi dengan cara wawancara kepada

warga/masyarakat yang merasakan secara langsung dampak kebijakan Dana Desa.

Review Teoritis

Konsep Kapasitas

Konsep kapasitas lebih dikenal dengan sebutan capacity building, hasil penelitian yang menjelaskan pentingnya kapasitas dalam pengelolaan sebuah organisasi (Grindle 2010; Horton 2003; Brown et al. 2001; Tim Peneliti STIA LAN Makasar 2012 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut merekomendasikan bahwa dalam proses mengelola organisasi penting mengembangkan kapasitas. Salah satu dimensi yang urgent untuk dilakukan peningkatan kapasitasnya adalah kapasitas kepemimpinan (Thomas A Mark 2006; Darmi, T, et.al. 2016; Khristina & Puatu 2009). Organisasi yang memiliki kapasitas kepemimpinan disinyalir akan berdampak pada kinerja organisasi. Kapasitas kepemimpinan dapat melakukan proses pengembangan kapasitas individu, organisasi dan sistem yang dimiliki organisasi (Darmi, T. et.al. 2017; Taut 2007; Stephen Ocheni, Moses Atakpa 2012). Selain itu aspek capacity building, yang mempunyai peran penting dalam mencapai visi misi program kebijakan adalah aspek individu dan kelompok (sumber daya manusia) sebagai pelaku dalam menerapkan semua kebijakan yang telah ditetapkan.

Para pakar menjelaskan pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan Sumberdaya Manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sehingga kemampuan yang dimiliki SDM dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dapat menjalankan roda organisasi, dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kapasitas kebijakan Dana Desa dimaknai bagaimana para pelaku atau pengelola kebijakan Dana Desa dapat mengembangkan, berinovasi dalam mengelola Dana Desa yang dimandatkan sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Lebih detail (Grindle 2010) menjelaskan *capacity building* dalam prosesnya memiliki indikator agar proses kapasitas tersebut dapat dievaluasi. Dalam konteks Kapasitas Kebijakan Dana Desa agar sejalan dengan tujuannya maka dapat mengidentifikasi apakah tugas dan kewenangan yang dimandatkan sudah berjalan efektif dan efisien, apakah para pelaku kebijakan Dana Desa sudah melakukan tugas dan kewenangannya? apakah para pelaku kebijakan Dana Desa sudah memiliki kapasitas (pemahaman regulasi, pemahaman kondisi lingkungan dan dapat bekerja secara profesional).

Kebijakan Dana Desa

Beberapa kajian menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah yang fokus pada pemberdayaan baik subsidi langsung maupun peningkatan kapasitas bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan melibatkan sektor yang lebih nyata (Tatik Mariyanti & Akhmad Affandi Mahfudz, 2016). Kebijakan dana desa memfokuskan pada instrumen untuk mengejar ketertinggalan daerah dan desa-desa tertinggal melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik, transportasi dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Ritwik Sasmal 2016). Pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien akan berkontribusi menciptakan desa-desa mandiri sekaligus dapat mewujudkan Nawa Cita dan sasaran pembangunan pedesaan seperti yang tertuang dalam RPJMN2015 – 2019.

Namun, untuk mengetahui berhasil atau gagal sebuah penerapan kebijakan publik memerlukan alat bantu. Alat bantu dapat menentukan baik buruknya kebijakan publik berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan berpedoman pada pendapat Purwanto (2012) indikator dalam melakukan penilaian implementasi kebijakan publik adalah : 1) input

kebijakan (sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan barang dan layanan dari program kegiatan yang telah ditentukan); 2) proses atau kegiatan (kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa berupa layanan publik), output kebijakan (keluaran kebijakan dilihat dari barang yang dibuat atau jasa dan layanan publik) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran; 3) hasil awal; 4) hasil jangka menengah; dan 5) hasil jangka panjang.

Indikator tersebut di atas dijadikan kerangka pikir teoritis dalam melihat sejauh mana penerapan kebijakan dana desa dapat berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di desa Sido Luhur. Fokus penelitian yang menjadi perhatian adalah penerapan kebijakan dana desa selama 3 (tiga) tahun ini dan apakah jumlah masyarakat miskin berkurang dengan adanya kucuran dana desa. Kajian ini juga melihat bagai mana program kegiatan dana desa (input) tersebut dapat mencapai output program melalui proses kegiatan yang dilakukan. Kemudian, dilihat dari konsekuensi dari pelaksanaan program kegiatan tersebut apakah dapat menciptakan hasil (awal, jangka menengah dan jangka panjang) yakni program kegiatan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat sasaran dengan kata lain jumlah

masyarakat di desa Sido Luhur. Pada akhirnya, dengan adanya peningkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat sasaran tersebut maka kemampuan masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak, ini dimaknai rumah tangga miskin sebagai sasaran kebijakan dapat berkontribusi terhadap program pengentasan kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan

Kajian tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kajian yang dilakukan oleh Ravallion (1996) menjelaskan indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah dapat memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara efektif, memiliki data penduduk miskin yang valid dan instrumen serta aplikasi model pengukuran yang tepat.

Penelitian Ravallion (2001) efektifnya kebijakan penanggulangan kemiskinan data empiris secara mikro sangat berperan. Data empiris secara mikro merupakan dasar yang kuat dalam menentukan sebuah kebijakan. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Ravallion dan Chen (2007) di negara China menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di China antara tahun 1980 -2001 menurun secara ekstrem, namun penurunan

kemiskinan tersebut tidak secara merata di setiap provinsi, akan tetapi kontribusi penurunan tingkat kemiskinan secara Nasional di China adalah disumbang oleh wilayah pedesaan. Kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di pedesaan merupakan kebijakan yang tepat. Pada Tahun 2007 Revallion melakukan penelitian kembali, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) Provinsi yang memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi akan berdampak pada lambatnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian Hallerod dan Larsson (2008) meneliti tentang hubungan antara kemiskinan dengan kesejahteraan yang dimiliki masyarakat, berpendapat bahwa pendapatan (income) masyarakat miskin berpengaruh terhadap kesejahteraan yang dimiliki warga miskin. Harllerod dan Larsson (2008) memberi catatan pengentasan kemiskinan tidak serta-merta hanya fokus kepada pendapatan masyarakat miskin saja, tetapi mengakhiri persoalan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas akan lebih bermanfaat.

Kajian Dartanto dan Nurkholis (2013) menjelaskan faktor yang mempengaruhi penduduk miskin di Indonesia adalah kualitas pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala

keluarga, jumlah anggota keluarga, kondisi kesehatan anggota keluarga, program kredit, aset yang dimiliki. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil kajian Skoufias, et.al (2000) menjelaskan kondisi kemiskinan masyarakat karena adanya faktor-faktor di atas. Faktor-faktor tersebut sangat rentan dipengaruhi apabila terjadi kondisi krisis ekonomi yang dialami negara. Tingkat kemiskinan sangat meningkat drastis dibandingkan sebelum terjadi krisis.

Hasil kajian tentang pengentasan kemiskinan disepakati oleh beberapa peneliti bahwa strategi pengentasan kemiskinan, penyebab dan dampak kemiskinan karena tata pemerintahan yang buruk, ketidakstabilan politik, minimnya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, besarnya demografi, kurangnya kapasitas pendidikan masyarakat berbasis keterampilan (Khalid, et.al, 2012: Bayudan&Lim, 2014; Duclas et.al, 2010).

Data BPS jumlah penduduk miskin berubah setiap tahun. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan variabel yang ada. Indikator kemiskinan setiap daerah, desa dan kota bahkan antar negara bisa tidak sama. Indikator garis kemiskinan yang dipakai oleh lembaga-lembaga, negara. Rata-rata indikator penentuan garis kemiskinan berdasarkan seberapa besar tingkat pengeluaran perhari setiap penduduk. BPS RI, 2016, garis

kemiskinan di pedesaan pada tahun 2010 sebesar Rp. 192.354,- per bulan atau rata-rata pengeluaran perbulan sebesar Rp, 6.411,- per hari. Pada tahun 2016 garis kemiskinan meningkat menjadi 343.647,- per bulan atau rata-rata Rp. 11.454,- per hari. Apabila dibandingkan nilai tukar rupiah dengan dollar pada hari ini yang kisaran 13.000, - rupiah, artinya garis kemiskinan di Indonesia tidak lebih dari 1 dollar per hari. Garis kemiskinan di Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan seperti pada tabel 1.

Tabel 1

Garis kemiskinan dari tahun 2010 – 2017

Tahun	Kota (Rp)	Desa (Rp)	Kota dan Desa (Rp)
2016	364.527,00	343.647,00	345.386,00
2015	356.378,00	333.034,00	344.809,00
2014	326.853,00	296.681,00	312.328,00
2013	308.826,00	275.779,00	292.951,00
2012	277.328,00	240.441,00	259.520,00
2011	253.016,00	213.395,00	233.740,00
2010	232.988,00	192.345,00	211.726,00

Sumber : BPS RI, 2016

Tabel di atas menjelaskan indikator besaran pengeluaran per bulan setiap jiwa penduduk yang dianggap miskin, baik masyarakat yang tinggal di perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Indikator tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam menetapkan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin. Data jumlah penduduk miskin akan mempermudah pemerintah dalam membuat program kebijakan pengentasan kemiskinan. Sebelum adanya kebijakan Dana Desa, secara Nasional ada beberapa skema program kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan menurut TNP2K (2010) adalah sebagai berikut:

1. Program perlindungan sosial, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdiri dari kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, pangan dan meningkatkan kapasitas kehidupan masyarakat yang dinyatakan miskin. Program perlindungan sosial tersebut diantaranya: a) Program Subsidi Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah (RASKIN). Raskin ini berupa bantuan beras kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan; b) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas program kebijakan diberikan kepada

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan kesehatan; c) Bantuan Siswa Miskin, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin; d) Program keluarga harapan, program ini merupakan pendekatan program pengentasan masyarakat miskin melalui perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin, mendorong partisipasi masyarakat miskin dan memberikan pengetahuan agar dapat menggali potensi desa. Program ini lebih dikenal dengan PNPM terdapat di perkotaan maupun di pedesaan.

3. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah, tujuan program ini adalah membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin yang bergelut dalam usah kecil atau home industri. Jenis program ini terdiri dari: a) pembiayaan dan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR); b) pembukaan akses pada permodalan dan pemasaran produk; b) peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha kecil melalui pelatihan kewirausahaan.

4. Program Pro-Rakyat penanggulangan kemiskinan, program ini

ditujukan untuk masyarakat di wilayah – wilayah tertentu yakni wilayah pesisir, tertinggal dan masyarakat miskin yang berada diperkotaan. Sasaran program ini masyarakat miskin yang berdomisili di tiga wilayah di atas. Program ini dilakukan dengan cara menyediakan program penyediaan rumah sangat murah, program angkutan umum murah, program penyediaan air bersih, program subsidi listrik, program peningkatan kualitas kehidupan nelayan di daerah pesisir.

Untuk optimalnya pengentasan kemiskinan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TKPKN), tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan memiliki anggota Menteri terkait yang diwakili oleh pejabat eselon I, dari unsur masyarakat, dunia usaha serta Badan terkait dalam menyukseskan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan, untuk tingkat provinsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, ketua TKPKD/provinsi adalah Wakil Gubernur. Di tingkat

kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Menindaklanjuti Perpres di atas maka di terbitkanlah Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga pemerintah menetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K bertugas: a) menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; b) melakukan koordinasi dan menyelaraskan serta mengintegrasikan program kebijakan pengentasan kemiskinan di pihak-pihak yang diberi kewenangan; 3) melaksanakan monev pelaksanaan program kegiatan pengentasan kemiskinan. TNP2K berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden.

Hasil dan Pembahasan

Input Kebijakan

Besaran pengalokasian dana desa kepada desa memiliki ketentuan dan beberapa indikator, salah satu syarat dan ketentuannya adalah berdasarkan seberapa tinggi tingkat kemiskinan di desa tersebut. Semakin tinggi tingkat kemiskinannya maka desa tersebut akan semakin besar mendapatkan kucuran dana desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN menjelaskan indikator pengalokasian dana desa yakni

25% berdasarkan jumlah penduduk, 35% berdasarkan angka kemiskinan, 10% berdasarkan luas wilayah dan 35% berdasarkan kesulitan geografis desa. Prosedur dan mekanisme pengalokasian dan penggunaan Dana Desa secara detail diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Anggaran dana desa secara nasional pada tahun 2017 menjadi 60 triliun, naik secara signifikan bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Pemerintah Pusat menganggarkan DD pada tahun 2016 sebesar 46,98 triliun rupiah, tahun 2015 DD dialokasikan dan terealisasi sebesar 20,76 triliun.

Peningkatan anggaran dana desa, menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dimulai dari desa-desa, sebagai konsistensi komitmen pemerintah dalam menerapkan UU Desa. Besaran anggaran dana desa oleh pemerintah pusat tertuang dalam APBN pada tahun 2017 seperti dalam table 2.

Tabel 2 menjelaskan besaran anggaran dana desa yang diterima setiap provinsi yang diperuntukkan untuk desa seluruh di Indonesia terdiri dari 74.954 Desa – jumlah tersebut dapat digolongkan 20.167 tergolong desa tertinggal, 51.022 tergolong desa berkembang dan 2,904 telah menjadi desa

mandiri, dari 74.954 Desa di Indonesia, Indonesia hanya memiliki 4% Desa mandiri (Darmi, 2015). Evaluasi Output dan Outcome penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa 3,8%, pembangunan desa 87,7%, pemberdayaan masyarakat 6,8%, pembinaan kemasyarakatan 1,8% (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2017).

Tabel 2

Besaran Anggaran Dana Desa per Provinsi di Indonesia Tahun 2017

No	Provinsi	Jumlah Desa	Total Dana	No	Provinsi	Jumlah Desa	Total Dana
1	Aceh	6.497	4.892.571.795	18	Sul. Tengah	1.865	1.430.375.412
2	Sumatera Utara	5.418	4.197.972.490	19	Sul. Selatan	2.257	1.820.518.240
3	Sumatera Barat	928	796.538.971	20	Sul. Tenggara	1.917	1.482.032.772
4	Riau	1.592	1.269.305.925	21	Bali	636	537.258.505
5	Jambi	1.399	1.090.942.601	22	NTB	995	865.014.066
6	Sumatera Selatan	2.859	2.267.261.445	23	NTT	2.996	2.360.353.320
7	Bengkulu	1.341	1.035.340.413	24	Maluku	1.198	961.602.798
8	Lampung	2.435	1.957.487.721	25	Papua	5.420	4.300.947.518
9	Jawa Barat	5.312	4.547.513.838	26	Maluku Utara	1.064	832.406.416
10	Jawa Tengah	7.809	6.384.442.058	27	Banten	1.238	1.009.506.961
11	DI Yogyakarta	392	368.567.559	28	Bangka	309	261.661.579
12	Jawa Timur	7.724	6.339.556.181	29	Belitung	657	513.958.123
13	Kal. Barat	2.031	1.616.725.259	30	Gorontalo	275	228.182.536
14	Kal. Tengah	1.434	1.148.904.929	31	Riau	275	228.182.536
15	Kal. Selatan	1.865	1.430.375.412	32	Papua Barat	1.743	1.364.412.395
16	Kal. Timur	841	692.420.247	33	Sul. Barat	557	461.412.395
17	Sul. Utara	1.508	1.161.358.872	33	Kal. Utara	447	369.938.349
					Total	74.95	60.000.000.000

Sumber : Kementerian Keuangan, 2017.

Tabel 3

Besaran Anggaran Dana Desa se- Provinsi Bengkulu

No Kabupaten	Tahun dalam milyar rupiah		
	2015	2016	2017
1 Bengkulu Selatan	8.295.334	87.028.089	110.748.849
2 Bengkulu Utara	12.559.822	130.594.530	166.310.259
3 Rejang Lebong	7.419.028	74.796.330	95.495.934
4 Karo	11.157.798	134.705.100	148.777.851
5 Seluma	10.456.782	109.890.905	139.486.234
6 Mookeroko	8.845.831	90.329.632	115.058.353
7 Lebong	6.075.440	56.952.592	72.563.476
8 Kepahiang	6.300.120	64.305.935	81.406.596
9 Bengkulu Tengah	8.295.334	85.282.139	108.405.041

Sumber: www.djpd.bengkulu.go.id

Tabel 3 menunjukkan perkembangan atau kenaikan secara signifikan DD oleh pemerintah pusat ke tiap Kabupaten. Tabel 3 menjelaskan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, naik 948,99% dan tahun 2017 naik 27,16%. Kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana desa, sangat menunjang percepatan pembangunan desa di Provinsi Bengkulu. Menarik untuk dianalisis kenaikan kurun DD pada tahun 2016 di Kabupaten Seluma sangat signifikan hampir mencapai 1.000%. Faktor penyebab kenaikan transfer dana desa pada Kabupaten Seluma tersebut dikarenakan indikator persyaratan alokasi dana desa yang ditetapkan oleh Presiden, yakni berdasarkan tingkat kemiskinan dan luas wilayah. Tahun 2013 -2015 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma mencapai 21,22% jauh melampaui tingkat kemiskinan nasional maupun provinsi (BPS, 2015). Luas wilayah Kabupaten Seluma mencapai 2.404 km², dari wilayah-wilayah tersebut 50% masuk dalam kategori daerah terisolir dan tertinggal. Penggunaan Dana Desa

sebagian besar sudah difokuskan kepada pembangunan desa terutama penyediaan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar koneksi antar lingkungan desa. Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 mendapatkan kucuran dana sebesar 1.035.340.413 rupiah untuk pembiayaan anggaran desa sejumlah 1.341 desa.

Pemerintahan Jokowi dengan konsep Nawacita, berkomitmen membantu daerah-daerah tertinggal dengan mengalokasikan dana desa ke daerah – daerah ditambah dengan alokasi transfer yang lainnya untuk daerah, jadi total transfer pusat ke daerah mencapai 34,5% dari total anggaran DD (R-APBN 2018). Komitmen tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk membangun dimulai dari pingiran (desa-desa). Salah satu programnya adalah pengentasan kemiskinan. Analisis di atas menunjukkan implementasi kebijakan DD sudah memiliki relevansi indikator yang baik dilihat dari sisi input kebijakan.

Proses kebijakan (input dan output)

Desa Sido Luhur salah satu desa dari 182 desa di Kabupaten Seluma mendapat alokasi dana desa dari APBN setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2015 desa Sido Luhur mendapatkan bantuan sebesar Rp. 269.910.026,-. Tahun 2016 desa Sido Luhur mendapatkan bantuan sebesar Rp. 604.395.564,- tahun 2017 desa Sido Luhur mendapatkan

bantuan sebesar Rp. 768.514.431. DD di desa Sido Luhur selama 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Kucuran dana desa tersebut tercermin dalam APBN. Hal ini, sangat menggembirakan warga masyarakat desa Sido Luhur, kenaikan dana desa naik di atas 20% pertahun (baca tabel 4).

Tabel 4

Anggaran Dana Desa di Desa Sido

No	Tahun	Bantuan DD/dalam Rp	Kenaikan/ tahun	%
1	2015	269.910.026		
2	2016	604.395.564	333.485.538	21.39
3	2017	768.514.431	164.118.867	27.15

Luhur selama 3 Tahun

Perkembangan kemajuan desa Sido Luhur sangat bagus dibanding sebelum ada bantuan DD. Untuk mengoptimalkan DD Kepala desa dan masyarakat (stake holder) sepakat membuat program-program pembangunan desa berorientasi pada pembangunan infrastruktur desa (fisik), uraian program kegiatan tahun 2015-2017, seperti pada tabel 5, misalnya pembuatan infrastruktur jalan lingkungan, jembatan, sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga melalui pemanfaatan lahan tidur dengan membuat perkebunan Jahe, kemudian Jahe diolah menjadi produk minuman Jahe yang di kemas dan diberi merek Jahe Reflesia, pemberdayaan ekonomi dengan membuat koperasi

simpan pinjam serta di bidang pendidikan dengan mendirikan PAUD, dengan maksud agar anak-anak usia dini dapat belajar di lingkungan desa sendiri.

Tabel 5
Kebijakan Program kegiatan dari Dana

No	Tahun	Uraian Program Kerja	Presentase Alokasi DD
1	2015	Pembangunan balai desa, sarana dan prasarana kerja, jalan lingkungan	70% dari dana desa
		Penyenggaraan Pemerintahan Desa	30%
2	2016	Pembuatan jalan desa, jembatan dan rabat desa, pemanfaatan lahan tidur	75% dari dana desa
		Penyenggaraan Pemerintahan Desa	25%
3	2017	Pembuatan saluran air, rabat jalan, penyediaan air bersih, pembuatan PAUD, pembuatan koperasi simpan pinjam dan usaha jaha reflexia	75% dari dana desa
		Penyenggaraan Pemerintahan Desa	25%

Sumber: Laporan desa, 2017

Desa Tahun 2015 – 2017

Sumber : Laporan desa, 2017

Informasi tabel 5 menjelaskan bahwa kebijakan program kegiatan cenderung berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik berupa pembuatan infrastuktur jalan, jembatan dan prasarana dan sarana kerja. Sedangkan, pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum dilakukan program pengembangan kapasitas masyarakat dan peningkatan produktivitas masyarakat. Berdasarkan filosofi dan tujuan terbitnya UU Desa, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui :

- 1) meningkatkan pelayanan publik;
- 2) meningkatkan kesenjangan pembangunan antar desa;
- 3) meningkatkan perekonomian desa;
- 4) mengentaskan kemiskinan; dan
- 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dataempiris menunjukkan dari penilaian penerapan kebijakan publik DD dengan indikator proses dan kegiatan dalam rangkalah menghasilkan produktivitas output dari kebijakan program kegiatan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) dalam mengentaskan kemiskinan. Dilihat dari hasil awal maka penerapan kebijakan DD dapat dirasakan oleh masyarakat yakni tersedianya pelayanan publik dan dapat meningkatkan kesenjangan pembangunan di desa. Sedangkan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan perekonomian desa akan berkontribusi nyata dan akan memberikan dampak pada hasil jangka menengah dan hasil jangka panjang. Namun, tujuan UU Desa tidak mustahilmencapai sasaran yang tepat, apabila ada kerja keras semua pihak (stake holder), terutama Aparatur desa dan masyarakat sasaran.

Untuk maksimalnya pelaksanaan program kegiatan tersebut, penting dilakukan sejauh mana pencapaian output program kegiatan. Penilaian output program tersebut dapat dinilai dari sisi penerima manfaat rumah tangga miskin yang menjadi sasaran dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian Evaluation Consultant and Study (ECS),

integrated Community Driven development Project (ICDD) pada tahun 2015, salah satu ukuran yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan adalah penilaian kepuasan antara harapan dan kenyataan penerima manfaat dalam hal ini rumah tangga miskin. Hasil kajian tersebut menemukan terdapat gap antara harapan masyarakat penerima manfaat (rumah tangga miskin) dengan program kegiatan yang telah dilakukan yakni berupa (infrastruktur jalan, jembatan) dan kegiatan ekonomi lainnya cukup besar. Maka ke depan program kegiatan kebijakan dana desa lebih berorientasi kepada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) agar masyarakat sasaran dapat meningkatkan produktivitasnya.

Program kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan di desa Sido Luhu bukan hanya dari pengalokasian dana desa saja. Ada program lain, misalnya, program kartu harapan keluarga, kartu pintar dan kartu sehat, yang dikelola dengan beda institusi. “Apakah program – program tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Sido Luhu?”.

Jawaban atas pertanyaan ini akan menguji seberapa besar kontribusi kebijakan publik (dana desa) dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di desa

Sido Luhu. Para Informan sepakat mengatakan dari tahun 2014 - 2015 jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan program pemerintah (program kartu harapan keluarga, kartu pintar dan kartu sehat) sebanyak 134 KK dari 574 KK, tetap sama, tidak ada pengurangan ataupun kenaikan. Artinya, dari jumlah penduduk di Desa Sido Luhu yang mendapat kategori miskin sekitar 23,34% belum ada perubahan nyata selama 3 tahun terakhir. Data empiris ini, menunjukkan tidak ada pengurangan jumlah penerima manfaat (rumah tangga miskin) selama 3 tahun terakhir menegaskan bahwa program kegiatan atau kebijakan tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, dimaknai belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa Sido Luhu. Namun, kebijakan dana desa melalui program-program kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan sudah memenuhi target indikator. Artinya, kebijakan dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui adanya pembangunan di desa.

Hasil awal, jangka menengah dan jangka panjang

Efektivitas implementasi kebijakan publik dapat dilihat sejauh mana efektivitas program kegiatan dapat dilaksanakan. Tingkat kepuasan, harapan dan kenyataan penerima manfaat (rumah tangga miskin) menjadi tolak ukur dalam

penilaian program kegiatan. Penerima kebijakan DD adalah desa sebagai organisasi dan masyarakat sebagai penerima tidak langsung. Kebermanfaat yang diperoleh desa sebagai organisasi telah menunjukkan hasil yang nyata yakni adanya proses pembangunan yang baik, walaupun dilihat dari objek masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) belum dirasakan nyata, dari indikator peningkatan produktivitas berupa penerimaan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat sasaran.

Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kadus di desa Sido Luhur mengatakan bahwa pengalokasian dana desa sudah mempengaruhi perkembangan desanya dilihat adanya koneksi antar desa, antar RW dan antar RT, pembangunan infrastruktur desa, sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta sarana ibadah tapi belum berkontribusi secara nyata dalam penurunan kemiskinan di desanya. Lebih lanjut kepala desa menjelaskan, selama 3 tahun terakhir data kemiskinan yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya, tidak ada pengurangan dilihat dari jumlah penerimaan bantuan yang masuk kategori penduduk miskin. Artinya, pengurangan jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan program kemiskinan dari pemerintah menjadi tolak ukuran keberhasilan program tersebut.

Data empiris implementasi program kerja dilihat dari indikator output dan hasil jangka menengah dan hasil jangka panjang menunjukkan bahwa masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) belum merasakan dampak yang baik dari kebijakan dana desa. Sementara, tujuan UU Desa melalui peningkatan layanan publik dan peningkatan pembangunan desa dilihat dari output hasil awal sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat desa secara keseluruhan. Mengingat dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia maka masih perlu waktu dan kerja keras semua stake holder untuk terwujudnya tujuan UU Desa dalam hal mengentaskan kemiskinan.

Ke depan, untuk optimalnya pelaksanaan kebijakan dana desa dan untuk mencapai sasaran serta tujuan UU Desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa maka hal pertama yang harus dilakukan adalah proses dan kegiatan yang ditetapkan yang tertuang dalam APBDes agar mengacu pada output dan outcome yang diperuntukan bagi masyarakat sasaran (rumah tangga miskin). Proses dan kegiatan tersebut identik dengan kebijakan program kerja yang akan dilaksanakan setiap tahun yang tercermin dalam APBDes. Program-program kegiatan yang dibuat hendaknya diprioritaskan pada pengembangan

kapasitas masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) dan pengembangan potensi ekonomi desa.

Pada akhirnya, penulis hanya ingin meyakinkan, bahwa peningkatan kesejahteraan yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kerja keras semua pihak, termasuk masyarakat sasaran, dan tak ketinggalan adalah peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta dinas dan pihak terkait agar saling sinergi dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yakni mengurangi tingkat kemiskinan.

Kesimpulan

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu produk Administrasi Publik yang menjadi tugas pembaharuan administrasi publik dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah:

Pertama, secara empiris kebijakan dana desa pada objek penelitian di desa Sido Luhur menunjukkan bahwa Dana Desa belum berkontribusi nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Kedua, secara makro di lihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma, selama 3 tahun terakhir, tingkat kemiskinan masih bertingger di angka 21.22%. Artinya, Kebijakan Dana Desa belum dapat

menjadi akselerator dalam mengentaskan kemiskinan baik di Desa Sido Luhur khususnya maupun di Kabupaten Seluma secara umum.

Ketiga, Dana Desa sangat berperan atas kemajuan pembangunan fisik di desa Sido Luhur tetapi kurang berperan di sector penurunan angka kemiskinan.

Keempat, pedoman penggunaan dana desa kurang tegas memberikan arahan dan penekanan pada bidang penanganan kemiskinan sehingga aparatur desa kurang memahami arah penggunaan dana desa untuk bidang penanganan kemiskinan.

Kelima, Penganggaran dana desa belum mendukung prioritas penanganan kemiskinan sebagaimana program pemerintah pusat seperti pemberian KIS, KIP, PKH, Rastra sehingga kemiskinan di desa masih belum menurun seperti yang diharapkan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat terlaksanakan berkat fasilitas dari Universitas Terbuka pada Skema Penelitian Dasar Unggulan perguruan Tinggi UT dan dipresentasikan dalam kegiatan Simposium Nasioanl Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia ke 8 di Universitas Halmahera, 31 Oktober s/d 1 Nopember 2018.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Selum. (2015). *Bengkulu Dalam Angka*. Tais.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Bengkulu, (2015). *Provinsi Bengkulu Dalam Angka*, Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia. (2016). *Indonesia dalam angka*. Jakarta.
- Brown, L., Lafond, A. & Macintyre, K. (2001). *Measuring Capacity Building*. , (March), pp.919–966. Available at: www.cpc.unc.edu/measure.
- Dartanto, Teguh dan Nurcholis. (2013). *The Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49 (1), pp. 6-84.
- Darmi,Titi, (2016a).*Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa)*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18 (1)(Isu Sosial Budaya), pp.21–27. Available at: jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/48.
- Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto.,& Sundarso. (2016b). *The Capacity of Local Leaders to Improve Performance of New Autonomous Region (DOB) in Indonesia*. In *Advances in Economics, Business and Management Research*. Kunming, China: Atlantis Press, p. 104. Available at: www.atlantispress.com/php/paper-details.php?from
- Darmi, Titi.(2017a). *The Role Of Human Resources (HR) State Civil Apparatus (ASN) To Improve Performance Of New Autonomous Region (DOB) In Seluma Regency Of Bengkulu Province*. International Conference On Global Education V. Padang, Sumatera Barat: Ekasakti Press. ISBN 978-602-70525-4-4, p 3107 - 3116.
- Darmi, Titi., Suwitri, S., Yuwanto & Sundarso. (2017b). *Capacity Building as Accelerator for Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB)*: Case Study in Seluma Distrcit Bengkulu Province, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*. ISSN 2161 -7104, Vol 7(3), pp.100–117.
- Duclos, Jean Yves., Abdelkrim, Araar., and Giles, John. (2010)*Cronic and Transiet Poverty: Measurement and Estimation, with Evidence From China*. *Journal of Development Economics*, 91 (2), pp. 266-277.
- Grindle, M., (2010). *Good Governance: The Inflation of an Idea*. *Harvard University, Center for International Development*, (June), pp.1–21.
- Hassan, A. (2014). *The challenge in poverty alleviation: role of Islamic microfinance and social capital*.

- Humanomics, Vol. 30(Issue: 1), pp.pp.76–90.
- Horton, Douglash. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and development Organizations Around the World*, Ottawa; International Development Research Centre. In Netherlands: International Service For National Agricultural Research.
- Kusumastuti, A. (2015). *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur. Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 20 Nomor 1, pp.81–97.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Alokasi Dana Desa Tahun 2016*, Menurut Kabupaten/Desa. , pp.1–7.
- Khristina, A. & Puatu, S. (2009). *Community Capacity Building and Local Government Leadership : Describing Transformational Leadership Practices in Naga City , the Philippines.* , pp.18–41.
- Khalik, Aliyah., Zahid, Javied and Muhammad Arshad. (2012). *Poverty Allevition in India and Pakistan*. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (8), pp. 403-416.
- LAN, STIA, Makasar. (2012). *Capacity Building; Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Makasar*.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, Michael,Quinn.(2009). *Metode Evaluasi Kualitatif ke 2*. P. K. Penerjemah Budi Puspo Priyadi, ed., Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsr.
- Purwanto, E.A., dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan ke 1, Gava Media, Yogyakarta.
- Ravallion, Martin. (1996) *Issues in Measuring and Modelling Poverty*. The Economi Journal, 106, pp. 1328-1343.
- Ravallion, Martin. (2001). Growth, Inequality and Poverty: *Looking Beyond Averges*. *World Development*, 29 (11), pp1803-1815.
- Ravallion, Martin and Shaohua Chen. (2007). *China's (Uneven) Progress Against Poverty*. *Journal of Development Economics*, 82 (1), pp 1-42.
- Ritwik Sasmal, J.S. (2016). *Public expenditure, economic growth and poverty alleviation*. *International Journal of Social Economics*, Vol. 43(Issue: 6), pp.pp.604–618.

- Saputra, I.W.2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), 6 Nomor 1.
- Stephen Ocheni, Moses Atakpa. (2012). *Local Government and Apropriate Capacity Building For Accelerated and Sustainable Rural Development*. European Journal of Business and Social Sciences, 1 Nomor 3, p.131.
- Skoufias, Emmanuel., Asep Suryadi and Sudarno Sumarto. (2000). *Changes in Household Wefare, Poverty and Inequality During the Crisis*. Bulliten of Indonesian Economic Studies, 36 (2), pp. 97-114.
- Tatik Mariyanti, Akhmad Affandi Mahfudz. (2016). *Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Empirical evidence from Indonesia*. Humanomics, Vol. 32(Issue: 3), pp. 275–299.
- Taut, S. (2007). *Studying Self-Evaluation Capacity Building in a Large International Development Organization*. American Journal of Evaluation, 28(1), pp.45–59. Available at:<http://aje.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/45><http://aje.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1098214006296430>. Diakses tanggl 26 Maret 2016.
- Thomas A Mark.(2006). *Gurus on Leadership* P. Thorogood, ed., London: Thorogood, Publishing Ltd 10-12, Rivington Street, London, EC2A 3DU.
- Wallis, J and Killerby, P. 2004. *Social economics and social capital*. *International Journal of Social Economics*, Vol. 31(No. 3), pp.pp. 239–258.